



Astinana Yuliarti^{1*}
Rosalina Kumalawati²
Wisnu Putra Danarto³
Yogi Prasakti⁴
Irwan Ade Saputra⁵
Ghinia Anastasia Muhtar⁶

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NUSANTARA

Abstrak

Pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur di kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara menjadi wacana yang penting dan topik pembahasan di masyarakat. Kejelasan informasi adalah menjadi hal yang penting dalam mengambil keputusan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh tentang kebijakan pemerintah. Metode digunakan dalam penelitian adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data didapatkan dengan wawancara secara langsung dan penelusuran dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sejak pengamatan dan pengambilan data yang dilakukan sejak 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa dalam proses penyampaian informasi terkait keputusan pemindahan Ibu kota nusantara (IKN), masyarakat masih minim mendapatkan informasi, dominasi informasi awalnya hanya didapati dari media elektronik dan Media online, sehingga bentuk dan alur komunikasi formal masih jarang digunakan khususnya penyampaian informasi kepada masyarakat yang langsung merasakan dampak dari pembangunan ibu kota yang baru, sedangkan proses dan alur komunikasi dengan pihak instansi lebih dominan satu arah sehingga hanya dalam bentuk informasi yang sifatnya dari atas ke bawah.

Kata Kunci: IKN; Informasi; Ibu Kota Nusantara; Komunikasi Kebijakan

Abstract

The relocation of the national capital from Jakarta to East Kalimantan in the districts of Kutai Kartanegara and Penajam Paser Utara has become an important discourse and topic of discussion in society. Clarity of information is important in making decisions so that people have a complete understanding of government policies. The method used in the research is a descriptive study with a qualitative approach. Data was obtained by direct interviews and documentation searches. The results of the research show that since observations and data collection were carried out from 2021 to 2023, it shows that in the process of conveying information regarding the decision to move the Nusantara capital city (IKN), the public still received minimal information, the dominance of information was initially only obtained from electronic media and online media, so that the form and formal communication channels are still rarely used, especially in conveying information to the public who directly feel the impact of the construction of the new capital city, while the process and flow of communication with agencies is more dominant in one direction so that it is only in the form of top-down information

Key words: IKN; Information; Nusantara Capital City; Policy Communication

PENDAHULUAN

Pemindahan pusat pemerintahan dari awalnya di kota Jakarta diputuskan untuk dipindahkan di wilayah Kalimantan Timur khususnya Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sebagian Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana telah resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 silam dan kemudian dikuatkan melalui

^{1,2,3,4,6}Universitas Lambung Mangkurat

⁵Universitas Hasanuddin

email:astinana.yuliarti@ulm.ac.id, rosalina.kumalawati@ulm.ac.id, wisnu.danarto@ulm.ac.id, yogiprasakti.09082001@ulm.ac.id, irwan_adhe@unhas.ac.id, ghiniastraw@gmail.com

pengesahan Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara per 15 Februari 2022. Wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia sebenarnya bukanlah wacana yang baru, bahkan sejak pemerintahan presiden pertama Soekarno, wacana pemindahan ini sudah pernah dicanangkan, Kalimantan dianggap sebagai tempat yang ideal untuk menempatkan ibu kota baru pengganti Jakarta (Toun., 2018).

Pertimbangan geografis wilayah Ibu kota negara, sosial ekonomi, dan politik adalah alasan umum untuk memindahkan pusat ibu kota, dalam pertimbangannya untuk memindahkan ibukota, Indonesia tentu saja mempertimbangkan ketiga faktor tersebut, serta pengalaman negara lain di seluruh dunia yang sudah memindahkan ibukotanya. Pengalaman dari berbagai negara yang telah memindahkan ibukotanya akan memberikan pertimbangan dan masukan yang penting dan positif yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk mempelajari masalah di Indonesia (Hutasoit., 2019). Dibandingkan dengan Jakarta, yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Timur memiliki lahan yang luas dan mudah diakses, selain itu, diharapkan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah tersebut, sekaligus meratakan pembangunan di seluruh Indonesia (Alfansyah, 2023), sehingga harapan besar pemerintah bahwa pemindahan Ibu kota nusantara bisa menjadi solusi kepadatan penduduk yang terpusat di pulau jawa.

Selain itu berdasarkan apa yang tertuang dalam dokumen Kementerian PPN/Bappenas. 2022 (1) Memiliki lahan yang luas milik pemerintah atau BUMN, (2) berada di pusat wilayah Indonesia, (3) memiliki potensi konflik yang rendah, dan memiliki budaya yang terbuka terhadap pendatang, dan (4) memiliki sumber daya tanah dan air untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan didukung oleh Tri Matra darat laut dan udara. (6). Lokasi aman, karena kemungkinan bencana alam seperti gempa rendah. (7). Memiliki aksesibilitas pada lokasi yang tinggi karena di antara dua kota, Balikpapan dan Samarinda (Nanang, 2023).

Selain alasan geografis masalah sosial, ekonomi, politik, keterbatasan kondisi fisik, peningkatan juga menjadi alasan dan pertimbangan pemindahan ibukota negara (Hairunnisa dan Syaka; 2022, Amilia dan Andung; 2022). Pemindahan Ibu Kota akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di wilayah yang sedang dibangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dan di wilayah pendukung IKN, hal ini akan berdampak pada aspek lingkungan secara keseluruhan, Jika keterampilan dan pendidikan masyarakat setempat tidak ditingkatkan, ada kemungkinan adanya perbedaan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan antara penduduk setempat dan penduduk yang akan pindah ke IKN (Fristikawati et al; 2022).

Penyebaran informasi terkait pemindahan pusat pemerintahan yang direncanakan pun tidak luput dari peran penting media (Amilia dan Andung; 2022). Penyebaran informasi akan berpengaruh terhadap pembentukan persepsi publik terkait pemindahan IKN yang akan beragam, tergantung pada pengalaman dan latar belakang sosial ekonomi politik dari masyarakat (Fahrudin et al; 2022). Terlebih kebijakan Pemindahan ibu kota Nusantara adalah kebijakan pusat yang membutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam mengkomunikasikannya kepada masyarakat selain melalui pemberitaan dari media.

Untuk menjangkau seluruh masyarakat di daerah terutaaan di lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara, maka pemerintah butuh perangkat komunikasi dalam penyampaian informasi. Prinsip Komunikasi kebijakan yang terjadi di dalam pemerintahan merupakan penyampaian pesan, program dan buah pikir pemerintah kepada masyarakat (Ayuningtyas & Rahman., 2019). Sementara dalam Implementasi Kebijakan publik berdasarkan teori dari George C. Edward Edwar III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu diantaranya (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; dan (d) Struktur Birokrasi. Sedangkan jika berbicara terkait Komunikasi kebijakan makan ada tiga indikator yang penting untuk dipastikan yaitu (1) Transmisi; (2) Konsistensi dan (3) Kejelasan

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan/atau penggunaan kerangka penafsiran teoritis yang membentuk atau Mempengaruhi studi tentang permasalahan penelitian yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau

manusia (John W. Creswell, 2015). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha mengungkap suatu masalah/keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Kebijakan dalam Keputusan Pemindahan Ibu Kota Nusantara

Komunikasi dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin bertujuan untuk meningkatkan aktivitas koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial masyarakat, dalam hal ini mendukung keberhasilan dari tujuan sebuah organisasi (Ayuningtyas & Rahman., 2019). Informasi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kebijakan pemerintah yang akan memiliki dampak pada kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor, sehingga perlu perhatian khusus pemerintah untuk memastikan masyarakat teredukasi secara merata terkait keputusan tersebut.

Proses penyampaian informasi melalui komunikasi dalam bentuk sosialisasi mestinya harus dilakukan agar program dan rencana pemerintah dapat berjalan dengan baik dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam pemindahan pusat pemerintahan (Tahir, 2014). Sosialisasi kebijakan harus dilakukan dengan baik, sistematis dan terencana agar informasi yang disampaikan mengenai pelaksanaan dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipahami oleh sasaran peserta program (Rangkuti & Rangkuti., 2021) dalam hal ini masyarakat yang akan merasakan langsung dampak dari pemindahan pusat pemerintahan.

1. Transmisi

Diskursus terkait Ibu Kota Nusantara hanya diikuti oleh kalangan terbatas atau didominasi oleh kalangan tertentu saja, Komunikasi yang dilakukan dalam sektor privat yang hanya dihadiri orang beberapa perwakilan dari kalangan masyarakat di awal pengumuman pemindahan pusat negara tersebut dilakukan dengan komunikasi langsung pimpinan wilayah dengan pemangku kepentingan di Kelurahan Sepaku, kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga jika menggali lebih mendalam kepada masyarakat, maka akan didapati bahwa Awal penetapan informasi masih simpang siur di kalangan masyarakat yang notabeneanya tanah sekitar tempat mereka tinggal akan beralih fungsi dan dibangun sebagai pusat pemerintahan.

Pelaksanaan sosialisasi dalam transmisi pesan terkait pemindahan ibu kota Nusantara seyogyanya merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan regulasi yang telah diatur (Maria & As'ari., 2022).

Di awal pengumuman pemindahan Ibukota, Informasi di dominasi dari media, sehingga masyarakat juga banyak yang meragukan dan mempertanyakan keabsahan dari keputusan tersebut. Namun, setelah pembangunan di lakukan secara masif, maka informasi juga sudah semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, karena realisasi dari keputusan pemerintah telah terlihat melalui pembangunan fisik di lokasi titik nol Ibu kota Nusantara. Maka jelaslah bahwa transmisi komunikasi yang baik dalam penyalurannya akan menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang sesuai dengan rencana dan akan berjalan dengan baik pula.

2. Konsistensi

Konsistensi informasi berasal dari pusat yang menjadi sumber utama informasi terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Pemerintah. Konsistensi informasi yang disampaikan berisi perintah ataupun informasi yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pengabaran informasi melalui proses komunikasi haruslah memiliki kejelasan dan konsistensi sehingga dapat diterapkan pada masyarakat. Jika sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah berlangsung efektif, maka seharusnya pelaksanaannya pun harus konsisten sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak awal hingga selesai.

Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dalam menjalan kebijakan pemindahan hingga pembangunan wilayah pusat pemerintahan negara terlihat dari perkembangan dari waktu ke waktu, sejak penelitian mulai dilakukan di tahun 2021 yang mana informasi masih simpang siur dan masyarakat hanya memperoleh berita dari satu sumber saja yaitu media elektronik, namun di tahun 2023, kekonsistensian pemerintah dapat terlihat dengan

adanya struktur birokrasi yang dibentuk khusus yaitu badan Otorita IKN dan pembangunan fisik di lokasi ibu kota yang semakin kelihatan progresnya.

3. Kejelasan

Suatu kebijakan dapat terlaksana dan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan jika dipahami oleh semua pihak yang terkait, serta proses komunikasi yang dilakukan juga mesti jelas dan terarah. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan informasi secara detail terkait keputusan pemerintah dalam pemindahan pusat pemerintahan akan menyebabkan terjadinya interpretasi yang keliru bahkan justru bertentangan dengan informasi sebenarnya yang dimaksudkan oleh penyampai pesan/komunikasi dalam hal ini pemerintah pusat.

Kejelasan dalam penyampaian informasi terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara terjadi jika komunikasi dan penyebaran informasi dari pemerintah yang kemudian diterima oleh para pelaksana kebijakan di level bawah haruslah jelas untuk kemudian bisa diteruskan pada pihak yang berwenang dan sesuai target sehingga tidak justru membingungkan. Informasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur telah semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini menjadi legitimasi informasi bagi semua pihak akan kejelasan informasi dan keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemindahan pusat pemerintahan negara Indonesia.

Kendala dalam Komunikasi Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara

Wilayah Ibu kota Nusantara dibangun di wilayah perkebunan industri yang mana sebelumnya menjadi lokasi mata pencaharian masyarakat. Adanya ketakutan dan kekhawatiran masyarakat di masa depan untuk dapat bertahan dan bersaing dengan pendatang, menjadi ketakutan dan keengganan melihat kebijakan pemindahan ibu kota Nusantara ke wilayah mereka sebagai kebijakan yang menguntungkan. Pelatihan kerja dan persiapan Sumber daya terampil yang mampu bersaing telah menjadi perhatian oleh badan Otorita IKN, dengan diadakannya berbagai Bimbingan Teknis yang menyasar para masyarakat yang tinggal di ring satu wilayah IKN, namun hal ini belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses dan tergerak untuk ikut serta dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut.

Kekhawatiran masyarakat juga tergal dalam wawancara penelitian, yang mana menjelang pesat demokrasi di tahun 2024 yang nantinya menghasilkan kepemimpinan yang baru dan kemungkinan memiliki kebijakan politik yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya menjadi perhatian khusus di kalangan masyarakat. Pergantian pemimpin yang kemungkinan kontra terhadap pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Provinsi Kalimantan Selatan menjadi ketakutan sendiri oleh masyarakat jika nantinya pembangunan infrastruktur di pusat IKN tidak berlanjut karena adanya pandangan politik dan kebijakan yang berbeda, sehingga proyek IKN menjadi proyek “mangkrak” yang akan menyebabkan kerugian finansial untuk pemerintah dan masyarakat secara langsung yang berada di lokasi pembangunan.

SIMPULAN

Komunikasi Kebijakan dalam keputusan pemindahan pusat pemerintahan sudah terlaksana tetapi belum maksimal dan menjangkau seluruh kalangan sehingga masih terjadi berita simpang siur di masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang dan pembangunan Fisik membantu memahami masyarakat terkait Proyek pemindahan IKN, tetapi kenyataannya di masyarakat masih ada kekhawatiran di tengah masyarakat akan kemungkinan menjadi Proyek “mangkrak” terutama menjelang Pesta Demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, D. L., & Andung, P. A. (2022). Framing Media Barat terhadap Pemindahan Ibu Kota Nusantara. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(2), 182-193.
- Alfiansyah, A. (2023). IBU KOTA NEGARA BARU DALAM PANDANGAN HUKUM LINGKUNGAN. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 1(1), 9-14.
- Ayuningtyas, R. H., & Rahman, A. Z. (2019). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Fahrudin, A., Bajuri, D., & Billah, S. A. (2022). Analisis Retorika Pidato Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kanal Youtube Official iNews. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 5(2), 200-215.
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739-749.
- Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 1-15.
- Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 108-128.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2022. Rencana Induk IKN dalam Lampiran UU IKN. Dikases di <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf>
- Nanang, M. (2023). PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: AKANKAH MENGEKSKLUSI MASYARAKAT LOKAL (LAGI)?. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 35-39.
- Rangkuti, Z. A., & Rangkuti, M. R. 2021 Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program e-Parking di Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(2), 141-151.
- Santa Maria, I., & As' ari, H. (2022). Komunikasi Antar Implementor Kebijakan Penempatan Dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Pelalawan. *Journal Publicuho*, 5(3), 616-625.
- Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi.
- Tahir, A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara*, 1(70), 1-23.
- Toun, N. R. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 129-148.